PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : **EKSEKUTIF**

LEMBAGA : **PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU**

UNIT KERJA : **DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **RISA AHYANI**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **676599**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 1.700.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJARBARU , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 129 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
3. Tanah Seluas 215 m2 di KAB / KOTA BANJAR, HASIL SENDIRI Rp. 30.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 139 m2/74 m2 di KAB / KOTA KOTABARU, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
5. Tanah Seluas 19.572 m2 di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
6. Tanah Seluas 19.573 m2 di KAB / KOTA TANAH LAUT, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 132.000.000**

1. MOBIL, DAIHATSU MINIBUS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA MATIC SCOOPY Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA V1J02Q32L1A/T Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 24.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 317.300.000**

D.	SURAT BERHARGA	Rp.	----
E.	KAS DAN SETARA KAS	Rp.	447.072.399
F.	HARTA LAINNYA	Rp.	----
	Sub Total	Rp.	2.596.872.399
III.	HUTANG	Rp.	735.564.851
IV.	TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.861.307.548

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari *elhkpn.kpk.go.id.* Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui *elhkpn.kpk.go.id*, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.